



Analisis Sistem Akuntansi Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun

Nazori Majids^a, Lidya Anggraeni^b, Nadiatul Khoriah^c

^aEkonomi Dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah, nadiatulnadia25@gmail.com. UIN STS Jambi

ABSTRACT

Accounting information system is a system that aims to collect and process data and report information related to financial transactions. The mosque accounting system is the process of identifying, measuring, recording, and reporting financial transactions carried out by mosques as a form of accountability in managing mosque resources. The purpose of this study is to analyze the As Sulthan Mosque in Sarolangun Regency has not implemented an accounting system in its financial statements, to find out the accounting principles that have been applied by the As Sulthan Mosque, Sarolangun Regency, and to determine the accountability of financial management at the As Sulthan Mosque, Sarolangun Regency. This research is a qualitative research with the number of informants in this study is 5 people. The results showed that 1) As Sulthan Mosque in Sarolangun Regency had not implemented financial reports according to PSAK 45 Standards because As Sulthan Mosque in Sarolangun Regency was due to a lack of Human Resources who understood the applicable Financial Accounting Standards and the absence of experts with educational backgrounds in Accounting field. 2) 75% of the accounting principles that have been applied by Masjid As Sulthan, Sarolangun Regency, are 6 (six) principles applied from 8 (eight) existing principles. 3) Accountability of financial reports carried out by the As Sulthan Mosque, Sarolangun Regency by pasting its operational financial reports on the wall magazine, and announced when they will perform Friday prayers

Keywords: Mosque Accounting System, Accountability, Accounting Principles

ABSTRAK

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Sistem akuntansi masjid adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya masjid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun belum menerapkan sistem akuntansi dalam laporan keuangannya, untuk mengetahui prinsip akuntansi yang sudah diterapkan Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun, dan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan di Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun belum menerapkan laporan keuangan sesuai Standar PSAK 45 karena Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan tidak adanya tenaga ahli yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang Akuntansi. 2) Prinsip akuntansi yang sudah diterapkan Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun sebesar 75%, yaitu sebanyak 6 (enam) prinsip yang diterapkan dari 8 (delapan) prinsip yang ada. 3) Akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun dengan cara menempelkan laporan keuangan operasionalnya di mading, dan diumumkan ketika akan melaksanakan shalat Jum'at.

Kata kunci : Sistem Akuntansi Masjid, Akuntabilitas, Prinsip Akuntansi

1. PENDAHULUAN

Received Maret 10, 2023; Revised Mei 2, 2023; Accepted Juni 07, 2023

Secara teoritis, semua organisasi sektor publik seringkali dianggap tidak efisien dan tertinggal jauh dari kemajuan dan perkembangan sektor swasta, sehingga posisinya rendah dan tertinggal jauh dari sektor swasta. Inefisiensi organisasi dan keterlambatan dalam pengembangan disebabkan oleh fakta bahwa manajemen organisasi sebagian besar organisasi sektor publik masih lemah dan sering dianggap tidak signifikan. Ini mungkin karena organisasi sektor publik dimiliki oleh masyarakat umum atau komunitas di wilayah tertentu. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan suatu organisasi tergantung pada kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap pengelolaan organisasi tersebut, termasuk praktik akuntansi. Kondisi ini juga terjadi pada organisasi tempat ibadah.[1]

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Sistem akuntansi masjid adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh masjid sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya masjid. Untuk menghindari kesalahan pencatatan, Anda memerlukan sistem penagihan yang terprogram dengan baik. Mungkin saat ini sebagian besar pengelola masjid tidak membutuhkan sistem akuntansi masjid. Namun, karena meningkatnya kualitas pendidikan publik dan tumbuhnya kesadaran di kalangan umat Islam tentang pentingnya kembali ke gerakan masjid, akuntansi yang tepat mungkin telah menjadi persyaratan mendasar bagi masjid.[2]

Menurut Andarsari, untuk keperluan akuntabilitas publik, pengurus perlu menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba tentang Standar Akuntansi untuk Entitas Nirlaba, dikarenakan Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, Organisasi nirlaba harus memiliki hak dan hak untuk menyusun laporan keuangan dan melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan. Masjid perlu membuat laporan keuangan yang akurat dan menginformasikan pengguna laporan keuangan tersebut, terutama penyedia masjid dan masyarakat umum. Akuntansi harus digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan Dana Masjid secara akurat. Berdasarkan observasi awal, fenomena yang ditemukan bahwa Masjid As Sulthan telah melakukan pencatatan dengan bentuk dan format yang masih sangat sederhana, yaitu hanya berkebutuhan pada penerimaan dan pengeluaran kas. Perlu ditinjau lebih jauh lagi kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang ada, khususnya sesuai PSAK 45. Beberapa permasalahan yang ditemukan juga di antaranya 1) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas; 2) Keteraturan pengendalian prosedur operasional masih minim; 3) Bentuk laporan keuangan yang masih sederhana dan belum sesuai dengan Standar Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) 45; 4) Media transparansi masih di lingkup kecil. [3]

Adanya fenomena bahwa laporan keuangan yang disusun oleh masjid belum berdasarkan standar dan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya. Jika laporan keuangan yang disusun tidak berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku maka akan dipertanyakan tingkat keandalan dan relevansinya serta akan menyesatkan bagi para Pengguna. Menurut PSAK No. 45, laporan keuangan Entitas Nirlaba yang lengkap, terdiri dari Laporan posisi keuangan, Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Bermanfaat dalam pengambilan keputusan untuk menjamin para pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan PSAK No. 45.

Penelitian sebelumnya terkait dengan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK 45 membahas terkait dengan penerapan akuntansi masjid, bahwa pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana ke dalam bentuk buku kas.[4] Penelitian serupa juga menyatakan bahwa data data yang diperoleh dari 14 masjid yang berada di lingkungan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, pengurus masjid membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan administrasi masjid. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Sebagian besar pengurus masjid hanya membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas saja.[5]

Berdasarkan pernyataan dari Bapak H. Irwan, Bendahara masjid As Sulthan menunjukkan bahwa bentuk laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus masjid masih sangat sederhana di mana hanya terdapat elemen penerimaan dan pengeluaran kas. Namun, uniknya laporan keuangan tersebut telah dilakukan dengan bantuan sistem komputer sederhana yaitu ms excel. Sehingga ini menjadi hal yang positif meski, sebab niat dan kemauan dari pengurus masjid untuk membuat laporan keuangan telah ada ditambah juga dengan pengetahuan dalam menggunakan teknologi yang membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini perlu diberikan titik solusi untuk memperbaiki bentuk laporan keuangan yang dibuat bisa sesuai dengan standarnya. Dengan didukung oleh referensi-referensi terkait baik bentuk laporan keuangan yang sesuai juga bentuk sistem informasi akuntansi sederhana yang dapat dibuat. Akhirnya, hasil riset ini berkontribusi memberikan panduan laporan keuangan masjid yang sesuai standar khususnya PSAK 45 juga membuat dan menyediakan sistem informasi akuntansi masjid yang bisa digunakan oleh pengurus masjid untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji dan menganalisis implementasi akuntansi masjid yang sesuai dengan standar yang kemudian didukung dengan akuntansi masjid berbasis komputer.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Organisasi Non Laba

Nirlaba adalah badan amal seperti kelompok agama, yayasan, dan lembaga pendidikan. Meskipun organisasi tersebut adalah organisasi nirlaba, mereka masih berurusan dengan masalah keuangan karena masalah keuangan seperti anggaran, upah tenaga kerja, tagihan listrik, dan sewa. Organisasi nirlaba mendapatkan sumber daya dari donasi dari donor yang tidak mengharapkan untuk membayar kembali atau mengharapkan untuk membayar kembali manfaat ekonomi yang sama dengan jumlah sumber daya yang disediakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2012).[6] Contoh organisasi nirlaba adalah Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan individu yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.[7]

2.2 Sistem Akuntansi

Untuk mencapai tujuan suatu organisasi dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang dapat membantu organisasi dalam mengelola sumber datakeuangannya. Namun sebelum membahas definisi dari sistem akuntansi perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari sistem. Menurut Mulyadi, sistem adalah “Sekelompok unsur yang erat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian yang baik, dibutuhkan perencanaan system yang tepat. sistem yang dimaksud adalah system akuntansi. Untuk lebih jelasnya, maka penulis akan mengemukakan tentang pengertian sistem akuntansi. Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” pengertian Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.[8]

2.3 Akuntansi Syariah

Awalnya, akuntansi adalah bagian dari ilmu akurat. Singkatnya, itu adalah bagian dari ilmu yang berurusan dengan masalah hukum alam dan perhitungan dengan kebenaran mutlak. Sebagai bagian dari ilmu pasti, perkembangannya bersifat kumulatif dan penemuan setiap metode baru dalam akuntansi akan melengkapi dan memperkaya ilmu akuntansi. Juga, pemikir akuntansi pada awal perkembangannya adalah matematikawan seperti Kluca Pacioli dan Musa Al Khawarizmy.[9]

2.4 Prinsip Akuntansi

Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta menjadi dasar bagi pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa pihak yang memberikan pandangan secara berbeda tentang apa saja yang termasuk sebagai prinsip dasar akuntansi.[10]

Jika manajemen suatu perusahaan dapat mencatat dan melaporkan data keuangan yang dirasa sesuai untuk mereka, maka perbandingan laporan keuangan antarperusahaan akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, akuntan keuangan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dalam menyiapkan laporan keuangan. Di Indonesia, prinsip ini dikenal sebagai prinsip akuntansi berterima Umum (PABU) yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *generally accepted accounting principles (GAAP)*. Sebagai buku akuntansi menggunakan istilah prinsip akuntansi yang berlaku umum, prinsip akuntansi yang diterima umum umum, atau prinsip akuntansi lazim. PABU memungkinkan investor dan para pemangku kepentingan untuk membandingkan laporan keuangan antarperusahaan.[11] Profesi akuntansi telah menciptakan seperangkat standar dan aturan yang diakui secara umum sebagai pedoman dalam pelaporan akuntansi, yang dinamakan prinsip akuntansi yang berterima secara umum (*general accepted accounting principles, GAAP*).[12]

2.6 Akuntabilitas

Tujuan akan akuntabilitas, dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi keagamaan, terkait dengan PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, di mana perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi itu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dalam hal ini umat dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Menurut kondisi ini, transaksi yang jarang atau tidak akan

pernah terjadi dalam organisasi bisnis manapun, akan muncul dalam organisasi nirlaba. Namun demikian, dalam prakteknya organisasi nirlaba, transaksi tersebut sering tampil dalam berbagai bentuk.[14]

2.5 Pengertian Masjid

Kata masjid berasal dari bahasa Arab *sajada-yasjudu-sujuudan*, yang berarti sujud menundukkan kepala sampai ketanah. Dari kata *sajada* kemudian terbentuk kata *masjid* (jamak: *masajid*) yang artinya tempat sujud. Pengertian tempat sujud di sini tidak mengacu pada bangunannya-beratap atau tidak, berbatas atau tidak-yang pokok adalah tempat sujud. Ada juga yang menghubungkan kata *sajada* itu dengan tunduk atau patuh sehingga masjid pada hakikatnya adalah tempat untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah semata.[15]

Namun, dalam kenyataannya, masjid tidak hanya tempat bersujud, tetapi juga tempat kaum muslim melaksanakan berbagai aktivitas lainnya, seperti pendidikan, dakwa, dan budaya Islam. Pada bangunan masjid tertentu selain ruang utama yang berfungsi sebagai tempat shalat, terdapat juga ruang pertemuan (aula), kantor pengurus dewan kemakmuran masjid (DKM), perpustakaan, bahkan ruang kuliah, seperti di Masjid Syuhada, Yogyakarta. Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidun (Abu Bakar, Umat bin Khattab, Utsman bin Afan, dan Ali bin Abi Thalib) masjid berfungsi sebagai tempat mengendalikan pemerintahan negara, termasuk menyusun strategi perang. [16]

Di dalam Al-Qur'an istilah masjid ditemukan 19 kali, sedangkan istilah *sujud*, *sajada*, dan berbagai bentuknya ditemukan 92 kali. Kalau dikaitkan dengan pengertian diatas, masjid adalah suatu yang sangat universal. Al-Qur'an maupun sumber ajaran Islam lainnya, seperti hadis, tidak menjelaskan secara konkret bentuk bangunan masjid, dengan kata lain, tidak ada landasan dan aturan yang ditetapkan oleh Islam tentang bangunan masjid, yang menjadi syarat utama adalah arah hadap atau kiblat salat, yaitu Kakkah di kota Mekah. Pada bangunan masjid, arah kakkah dilambangkan atau ditandai dengan mihrab, yaitu ruangan kecil tempat imam memimpin salat berjamaah. [17]

Dalam perkembangannya kemudian, pengertian masjid menjadi lebih spesifik, yaitu sebuah bangunan atau gedung atau lingkungan yang ditembok yang dipergunakan sebagai tempat mengerjakan shalat, baik shalat lima waktu maupun shalat Jum'at atau shalat hari raya. Pengertian masjid sebagai suatu bangunan merupakan wujud atau aspek fisik dari kebudayaan Islam. Di Indonesia kata masjid dilafalkan berbeda-beda, seperti *mesigit* (Aceh), dan *mesigi* (Jawa) Barat, *meuseugit* (Aceh), dan *mesigi* (Sulawesi Selatan). Tidak hanya itu, ada penamaan tersendiri untuk bangunan masjid atau bangunan tempat salat yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak dipakai untuk shalat Jumat, yaitu musala-dengan berbagai nama atau sebutan, seperti *meunasah* (Aceh), *surau* (Minang), *langgar* (Jawa), *tajung* (Sunda), *suro* atau *mandersa* (Batak), dan *santrén* (Lombok). Dalam khazanah kebudayaan Islam dikenal istilah *mashad* (masjid-makam), yaitu masjid yang dibangun di kompleks makam; dan masjid-madrasah (masjid-pesantren), yaitu masjid yang dibangun di kompleks pesantren. Di Iran dan india dikenal *idghah*, bahasa persia untuk menyebut musala atau tempat salat terbuka, biasanya dipergunakan untuk shalat Idul Fitri dan Idul Adha.[18]

2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45. (PSAK 45)

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan Ciri-ciri organisasi nirlaba adalah, sebagai berikut, (1) Sumber daya nirlaba disediakan oleh penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau keuntungan finansial sebanding dengan jumlah sumber daya yang disediakan. (2) Jika produk/jasa yang sudah ada diproduksi tanpa tujuan mencari keuntungan dan organisasi nirlaba menghasilkan keuntungan, jumlahnya tidak akan dibagikan kepada pendiri atau pemilik organisasi. (3) Tidak ada kepemilikan, sebagaimana lazim bagi suatu entitas, dalam arti bahwa kepemilikan suatu lembaga nonprofit tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus, atau bahwa kepemilikan tersebut tidak mencerminkan persentase pemisahan entitas. Sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi nirlaba.[19]

Akun tahunan organisasi nirlaba yang terdiri dari neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan penyedia sumber daya nirlaba, anggota, kreditur, dan informasi relevan lainnya untuk memenuhi kepentingan mereka. Lebih khusus lagi, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan, adalah untuk (1) memberikan informasi tentang jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan aset bersih nirlaba. (2) Dampak transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat kekayaan bersih. (3) Sifat dan skala arus masuk dan arus keluar sumber daya selama periode waktu tertentu, dan hubungan di antara mereka. (4) Bagaimana organisasi nirlaba menerima dan menggunakan uang tunai, bagaimana mendapatkan dan membayar kembali pinjaman, dan faktor lain yang mempengaruhi likuiditas. (5) Bisnis jasa organisasi nirlaba.[20]

Masjid sebagai lembaga keagamaan Islam merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba (*non-profit oriented*). Masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan umat yang secara tidak langsung memerlukan ilmu dan praktik akuntansi dalam memunculkan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masjid juga memerlukan informasi yang dapat menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, para pengelola masjid (*takmir*) juga memerlukan sistem pelaporan

keuangan masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan; 1) keadaan dan kondisi jamaah, 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan masjid dan, 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan masjid. Hal ini bertujuan untuk pertanggungjawaban kepada para pengurus dan jamaah masjid.[21]

PSAK Nomor 45 Pelaporan Keuangan oleh Organisasi Nirlaba (Revisi 2011) Pelaporan keuangan oleh organisasi nirlaba telah disetujui oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. PSAK No. 45 (revisi 2011) menggantikan PSAK 45 untuk pelaporan keuangan nonprofit yang diterbitkan 23 Desember 1997. Organisasi nirlaba menerima sumber daya dari penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran atau keuntungan finansial yang sepadan dengan jumlah sumber daya yang disediakan. Transaksi tertentu, seperti berikut ini, terjadi di organisasi nirlaba yang jarang atau jarang terjadi di perusahaan. Menerima sumbangan.[22]

Sebagai lembaga keagamaan, sebagian besar Masjid menganggap tabu praktik akuntansi dalam pengelolaan dananya bahkan tidak tahu menahu bagaimana ilmu akuntansi ini digunakan untuk melakukan pengelolaan dana yang ada. Padahal bahwa praktik akuntansi merupakan instrumen transparansi dan akuntabilitas, dimana transparansi dan akuntabilitas keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan seluruh program di masjid. Disamping itu transparansi dan akuntabilitas dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan warga masjid melalui penyediaan informasi.[23]

Pengelolaan keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid (*takmir*) untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan masjid.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Jenis Penelitian

Jenis survei ini adalah survei deskriptif kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, foto, bukan angka. Menurut Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Moleong, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang.[24] Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun karena masjid ini adalah salah satu ikon Kabupaten Sarolangun yang merupakan masjid terbesar, dan seharusnya laporan keuangan yang dimiliki oleh masjid yang besar ini sudah baik, namun ternyata laporan keuangannya masjid masih belum sesuai standar. Objek peneliti ini bertempat di Jl. Lintas Timur Sumatra Kabupaten Sarolangun. Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang Ketua Masjid, 1 orang bendahara Masjid, dan 1 orang bagian pengurus Masjid.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengertian data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:[25]

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek survey atau dari responden baik individu maupun kelompok. Data ini biasanya dikumpulkan dengan menggunakan sarana dalam bentuk survei atau bahan wawancara. Data utama dalam penelitian ini adalah dari wawancara langsung dengan ketua dan bendahara masjid mengenai penyajian laporan keuangan masjid.

2. Data sekunder adalah data dari pihak atau organisasi yang menggunakan atau mempublikasikannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Ini adalah kumpulan informasi dari survei yang masih berupa fakta atau hanya berupa informasi. Data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dari literatur tentang gambaran umum masjid dan pelaporan keuangan yang disajikan.

3.4 Hasil dan pembahasan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dari seorang peneliti dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan emosi .[26] Observasi adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung dan pencatatan di Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun, guna mendapatkan hasil yang tepat dan akurat dari pemberi sumber data.
2. Wawancara, merupakan pertemuan yang direncanakan secara langsung antara peneliti dan yang informan untuk memberikan/menerima informasi tertentu. Para peneliti mewawancarai lima informan yang ditunjuk, yaitu ketua masjid, wakil ketua, bendahara, ketua imam, dan staff pengurus masjid.
3. Dokumentasi , adalah catatan insiden yang telah berlalu berupa bentuk goresan pena atau gambar atau karya-karya berdasarkan seseorang. Dokumen yang didapatkan berupa citra generik masjid, asal dana, bukti transaksi, dan laporan keuangan masjid.

3.5 Metode Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran Faisal untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.[27]

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penganalisaan data dimana data dikumpulkan, disusun, kemudian dibandingkan dengan teori yang disyariatkan. Tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif yaitu:[28]

1. Reduksi Data

Pada langkah ini peneliti melakukan riset data, seleksi data, memfokuskan pada masalah yang diteliti, melakukan penyederhanaan, melakukan abstraksi dan melakukan transformasi. Reduksi data berupa penerimaan dan pengeluaran kas, serta catatan wawancara.

2. Display Data

Pada langkah ini, peneliti menyajikan data dalam bab dan sub bab , menggunakan data yang direduksi dalam format teks untuk memudahkan pemahaman.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Proses penarikan kesimpulan berdasarkan survei terhadap pelaporan keuangan Masjid As-Sulthan Kabupaten Salo Langun. Kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan bagaimana sistem akuntansi Masjid As Sulthan.

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Gambaran Umum dan Hasil Penelitian

Kabupaten Sarolangun adalah salah satu daerah pemekaran di Provinsi Jambi dengan potensi kemajuan ekonomi, industri daerah, dan percepatan pertumbuhan daerah yang cukup pesat. Oleh karena itu, diperlukan tempat ibadah yang indah dan representatif. Tidak hanya sebagai penyeimbang segala aktivitas keduniawian, tetapi juga landmark Kabupaten Sarolangun di masa mendatang.

Selain dikenal sebagai Masjid Agung Sarolangun, masjid ini juga berjuluk Masjid Kubah Emas. Kata EMAS sendiri sebenarnya lebih bermuatan filosofis. Berasal dari visi Pemkab untuk mewujudkan “EMAS” (Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera) dalam jangka waktu 2006- 2011, kemudian dikembangkan dalam misi “Meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun secara profesional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan”. Kubah emas yang digunakan pun bukan materi emas yang sebenarnya, melainkan ornamen kubah yang dicat menyerupai emas. Namun, keapikan eksekusi pembuatannya membuat kubah tersebut hingga kini masih tampak seperti emas, apalagi jika dilihat dari kejauhan.

Gambar 1. Masjid Agung Sarolangun



Sebagai perpaduan warna emas pada kubah, warna coklat muda yang dikombinasikan dengan coklat tua sangat cocok bagi keseluruhan visual bangunan. Sebuah menara berwarna senada tampak menjulang di depan masjid. Kemegahan masjid ini sangat terasa di bagian dalam. Warna coklat yang mendominasi lantai, dinding, serta aksan pada tiang penyangga menimbulkan kesan mewah nan sejuk. Bagian yang paling menyita perhatian adalah di depan tempat mimbar dan mihrab berada. Aksan coklat yang berasal dari material membentuk frame di dinding depan, dilengkapi ornamen berwarna kuning emas. Ornamen berupa lukisan timbul ayat-ayat Al- Quran ini terletak masing-masing dua buah di kanan dan kiri mihrab. Tidak hanya itu, di sisi lebih luar mihrab terdapat kaligrafi ukiran kayu yang membentuk bingkai layaknya lukisan. Ukiran kayu juga menjadi ornamen di bagian atas mihrab. Sebuah pemandangan yang sangat indah. Tampaknya bagian depan masjid tersebut memang sengaja dibuat sebagai sentra visual. Hal ini terlihat dari model pintu utama yang bisa dibuka lebar dan langsung mengarahkan mata ke mihrab. Masjid ini diberi nama As Sulthan yang berarti raja atau pemimpin. Pada hakikatnya, semua manusia adalah khalifah atau pemimpin di muka bumi.

4.1.2 Sistem Akuntansi Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun

Suatu lembaga/organisasi/perusahaan secara sistematis mencatat transaksi keuangan sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Catatan yang dibuat dirangkum dalam laporan keuangan. Laporan ini dapat dibuat setiap saat, bulanan, triwulanan, tengah tahunan, dan tahunan atau periode akuntansi, jika diinginkan oleh para pihak kebijakan perusahaan.[28]

Tabel 1.

Laporan Pemasukan Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun Periode 2018-2019

Tahun	Pemasukan	Jumlah
2018		
Desember 2017	kotak wakaf	300,000
Januari	kotak waqaf	775,000
Februari	kotaq waqaf	1,270,000
	kotaq waqaf mastiah	99,999
	kotaq waqaf mastiah	100,000
Maret	kotaq waqaf	1,941,000
April	kotak wakaf	1,436,000

Mei	kotak waqaf	1,718,000
	wakap tri sara	250,000
	wakap ilyas jabin	500,000
Juni	kotak wakaf	1,558,000
	hasil waqaf hari raya idul fitri	7,298,000
Juli	kotak waqaf	1,072,000
	beli kipas angin bekas	200,000
Agustus	kotak waqaf	1,340,000
	wakaf noldiah \ murah	200,000
September	kotak waqaf	728,000
Oktober	kotak waqaf	1,056,000
November	kotak waqaf	1,456,000
Desember	kotak waqaf	1,390,000
	Jumlah	22,279,000
2019		
Januari	kotak wakaf	1,398,000
Februari	kotak waqaf	920,000
Maret	kotak waqaf	1,585,000
April	kotak waqaf	1,019,000
Mei	kotak waqaf	1,432,000
	wakaf safari romadhon	1,790,000
Juni		1,356,000
	hasil wakaf fitrah 1440 H	5,734,000
Juli	kotak waqaf	1,187,000
Agustus	kotak waqaf	1,635,000
September	kotak waqaf	1,669,000
	wakaf hamba Allah	50,000
Oktober	kotak waqaf	1,128,379
	wakaf Hamba Allah	50,000
November	kotak waqaf	243,000
Desember	wakaf rusmiana	250,000
	wakaf naltiah	100,000
	wakaf hamba Allah	1,500,000
	kotak waqaf	2,173,500
	wakaf darni	200,000
	wakaf anak buah rusdi	100,000
	hamba Allah	400,000
2020		
Januari	kotak waqaf	2,902,000

	wakaf anak buah rusdi	50000
	wakaf mina	100000
Februari	kotak waqaf	2186000
	wakaf anak buah rusdi	50000
	wakaf saduna	50000
Maret	kotak waqaf	1,803,000
April	kotak waqaf	2,589,000
Mei	kotak waqaf	1954000
	wakaf amri	50000
	wakaf H. Mukhtar (alm)	1200000
	wakkaf hari raya idul fitri	4478000
	wakaf H.Rohana	200000
	hamba Allah	150000
	wakaf ASNANI	300000
Juni	kotak waqaf	1861000
Juli	kotak waqaf	1079000
	untuk masjid raya	470000
Agustus	kotak waqaf	782000
	untuk masjid raya	568000
September	kotak waqaf	833000
Oktober	kotak waqaf	1045000
November	kotak waqaf	694000
Desember	kotak waqaf	739000

Sumber: Laporan Keuangan Masjid As Sulthan Kab. Sarolangun, 2018-2020

Tabel 2.
Laporan Arus Kas Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun Periode 2020

No	Penerimaan	Jumlah	No	Pengeluaran	Jumlah
1	Saldo Aawal Per 31 Jan 2020	47.108.700	1	Pengajia umum (14x200.000)	2.800.000
2	Infaq Jum'at 03/02/2020	4.160.000	2	Pengajian mingguan pagi (4x250.000)	1.000.000
3	Infaq Jum'at 10/02/2020	3.810.000	3	Khatib Jum'at (4x300.000)	1.200.000

4	Infaq Jum'at 17/02/2020	5.180.000	4	Miazin sholat Jum'at (4x50.000)	200.000
5	Infaq Jum'at 24/02/2020	3.675.000	5	Khatib cadangan (3x100.000)	300.000
6	Tabungan infaq bln Feb 2020	3.420.000	6	By Cleaning Sevis 2 Orang	1.650.000
7	Bantuan renovasi masjid	2.800.000	7	Bantuan pengajian RMAF (3x50.000)	150.000
8	Infaq Bp. Hamid	1.500.000	8	Honor imam rawatib	750.000

Sumber: Laporan Keuangan Masjid As Sulthan Kab. Sarolangun, 2018-2020

Laporan Keuangan Sesuai Standar PSAK 45 yaitu Laporan posisi keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Komponen dalam pencatatan laporan keuangan tersebut, yaitu:

- Neraca (laporan posisi keuangan) yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan berupa aset, kewajiban dan net aset pemilik suatu masjid pada tanggal tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melihat di Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun tidak membuat neraca.
- Laporan Operasional adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah pendapatan dan beban selama kegiatan operasional berlangsung. Dalam penelitian ini pencatatan yang dilakukan oleh Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun tidak melakukan pencatatan laporan operasional,
- Laporan Arus Kas yaitu laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayarkan oleh suatu masjid periode tertentu. Dalam penelitian ini Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun telah mencatat laporan arus kasnya.
- Catatan atas laporan keuangan, dalam penelitian ini Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun tidak mencatat Catatan atas laporan keuangan.

Sehingga dalam penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam menyajikan laporan keuangan masjid, Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun belum sesuai dengan standar PSAK 45 karena hanya menyajikan laporan keuangan dalam bentuk arus kas saja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Diyani Ade Rizky [29] yang sama-sama meneliti laporan keuangan masjid, letak perbedaan kedua penelitian ini yaitu dimana pada penelitian ini untuk melihat sistem akuntansi Masjid yang dilihat dari komponen-komponen Laporan posisi keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan apakah sudah lengkap sesuai standar PSAK 45 atau belum. Sedangkan dalam penelitian Diyani Ade Rizky[30] yaitu untuk mengetahui penyusunan, bentuk, dan isi laporan keuangan pada Yayasan Masjid Al-Falah dengan mengacu pada ketentuan ketentuan PSAK No. 45 Kemudian penelitian Sinta Putri Alni[31] dimana penelitian tersebut juga membahas sistem akuntansi laporan keuangan masjid sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku yaitu jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, buku besar setelah penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Sementara penelitian ini sistem akuntansi Masjid yang dilihat dari komponen-komponen Laporan posisi keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pernyataan atas pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan, terkait problematika yang dihadapi oleh pengurus ta'mir Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun dalam penyusunan laporan keuangan, terletak pada sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam bidang Akuntansi, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan suatu aturan dalam SAK. Hal ini dikarenakan belum ada pengurus Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang Akuntansi. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang Akuntansi ini adalah permasalahan/problematika yang sangat mendasar pada penyusunan laporan keuangan seperti PSAK 45 tentang penyusunan laporan keuangan entitas berorientasi non laba

4.1.3 Prinsip Akuntansi yang Sudah Diterapkan Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun

Prinsip akuntansi dasar adalah prinsip atau karakteristik yang mendasar akuntansi dan semua masalah, dan, termasuk laporan keuangan, diterjemahkan dari tujuan laporan keuangan, asumsi akuntansi, dan konsep teori akuntansi pengembangan metode atau prosedur akuntansi. Digunakan untuk menyusun laporan keuangan tahunan. Beberapa pihak sedang memberi pandangan secara berbeda tentang apa saja yang termasuk sebagai prinsip dasar akuntansi.

Berdasarkan teori tersebut prinsip akuntansi yang dilakukan oleh pengelola masjid untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan masjid yaitu kontinuitas usaha, kesatuan usaha, periode akuntansi, kesatuan pengukuran, bukti yang objektif, pengungkapan sepenuhnya, konsistensi, realisasi.

1. Kontinuitas usaha (*going concern*)

Konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa yang akan datang, sehingga Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun tetap berdiri tanpa adanya ancaman pengahancuran, pemindahan dan sebagainya.

2. Kesatuan Usaha (*Business Entity*)

Konsep ini menganggap bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. sehingga pelaporan keuangan masjid tersebut bisa transparansi tanpa adanya campur tangan dari pemilik masjid.

3. Prinsip Periode Akuntansi (*Accounting Periode*)

Kegiatan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan disusun per periode pelaporan. Sehingga laporan keuangan masjid dapat disusun dengan mudah berdasarkan priode akuntansi.

4. Prinsip Kesatuan Pengukuran (*Measurent Unit*)

Konsep ini menganggap bahwa semua transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam bentuk uang (dalam artian mata uang yang digunakan adalah dari negara tempat perusahaan berdiri). Sehingga pencatatan laporan keuangannya selaras angka mata uang tersebut.

5. Prinsip Bukti Yang Objektif (*Objektif Evidence*)

Informasi yang terjadi harus disampaikan secara objektif. Suatu informasi dikatakan objektif apabila informasi dapat diandalkan, sehingga informasi yang disajikan harus berdasarkan pada bukti yang ada. Prinsip ini menekankan agar pembuktian dari pencatatan laporan keuangan masjid didasarkan oleh bukti-bukti yang jelas, misalnya dari bukti kuitansi dan sebagainya.

6. Prinsip Pengungkapan Sepenuhnya (*Full Disclousure*)

Konsep ini menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai. Sehingga jelas informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban-beban masjid tersebut. Dan dalam penelitian saya mengenai masjid As Sulthan dari laporan keuangannya hanya menyusun laporan arus kas saja dalam pembuatan laporannya. Sebagaimana penelitian mewawancarai Bapak H. Irwan Ahmad bendahara Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun

7. Prinsip Konsistensi (*Consistensy*)

Konsep ini menghendaki bahwa perusahaan harus menerapkan metode akuntansi yang sama dari suatu periode ke periode yang lain agar laporan keuangan dapat diperbandingkan. Sehingga akan mudah dibaca dari tahun ke tahun perputaran keuangan masjid tersebut.

8. Prinsip Realisasi (*Matching Expense With Revenue*)

Prinsip ini mempertemukan pendapatan periode berjalan dengan beban periode berjalan untuk mengetahui berapa besar laba/rugi periode berjalan.

4.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaaURtan terhadap peraturan perundang- undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.^[32]

Tujuan akan akuntabilitas, dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi keagamaan, terkait dengan PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, di mana perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi itu memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dalam hal ini umat dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Menurut kondisi ini, transaksi yang jarang atau tidak akan

pernah terjadi dalam organisasi bisnis manapun, akan muncul dalam organisasi nirlaba. Namun demikian, dalam prakteknya organisasi nirlaba, transaksi tersebut sering tampil dalam berbagai bentuk [33]

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan:

1. Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun belum menerapkan laporan keuangan sesuai Standar PSAK 45 karena Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami tentang Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan tidak adanya tenaga ahli yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang Akuntansi.
2. Prinsip akuntansi yang sudah diterapkan Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun sebesar 75%, yaitu sebanyak 6 (enam) prinsip yang diterapkan dari 8 (delapan) prinsip yang ada, ke-enam yaitu prinsip itu adalah 1) prinsip kontinuitas usaha (*going concern*), 2) kesatuan usaha (*business entity*), 3) prinsip periode akuntansi (*accounting periode*), 4) Prinsip kesatuan pengukuran (*measurement unit*), 5) prinsip bukti yang objektif (*objektif evidence*), dan 6) prinsip konsistensi (*consistency*).
3. Akuntabilitas laporan keuangan yang dilakukan Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun dengan cara menempelkan laporan keuangan operasionalnya di mading, dan diumumkan ketika akan melaksanakan shalat Jum'at.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka, penulis dapat mengajukan beberapa saran.

1. Masjid As Sulthan Kabupaten Sarolangun dalam pencatatan laporan keuangannya masih belum menggunakan prinsip dan standar akuntansi masjid PSAK 45, maka sebaiknya membuat laporan keuangan yang memadai, sehingga laporan keuangan masjid tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan lebih transparansi, agar informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat disajikan dengan jelas dan baik.
 2. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai tingkat kepuasan masyarakat dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tiara Maryanti, "Analisis Penerapan Akuntansi Masjid dengan Menggunakan Microsoft Excel for Accounting" 29, no. 1 (2018): 13.
- [2] Tiara Maryanti, "Analisis Penerapan Akuntansi Masjid dengan Menggunakan Microsoft Excel for Accounting" 29, no. 1 (2018): 13.
- [3] Pipit Rosita Andarsari, "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)," *Ekonika : Jurnal ekonomi universitas kadiri* 1, no. 2 (July 20, 2017), <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>.
- [4] Dewi Yibta Nariasih, Taufik Kurrohman, and Andriana Andriana, "Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan Kombinasi PSAK Nomor 45 dan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus Pada Masjid XYZ)," *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 4, no. 1 (May 8, 2017): 6, <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i1.4553>.
- [5] Sari Opti, Sri, "Laporan Keuangan Masjid di Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan," 2020, 12.
- [6] Pipit Rosita Andarsari, "Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)," *Ekonika : Jurnal ekonomi universitas kadiri* 1, no. 2 (July 20, 2017), <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>
- [7] Diyani Ade Rizky and Yazid Yud Padmono, "Analisis Penerapan Psak No. 45 Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya" 2, no. 7 (2013): 18.
- [8] Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016).
- [9] Wasilah Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019).
- [10] Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana, 2011).
- [11] M. Revee James, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2009).
- [12] Wibowo, *Pengantar Akuntansi II* (Palmerah Selatan: PT Grasindo, 2004).
- [13] Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dan IFRS* (Yogyakarta: ANDI, 2016).
- [14] Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002).
- [15] T. Editor, *Mesjid-Mesjid Bersejarah Di Jakarta* (Erlangga, 2011), <https://books.google.co.id/books?id=pOVuCQAAQBAJ>.
- [16] T. Editor, *Mesjid-Mesjid Bersejarah Di Jakarta* (Erlangga, 2011), <https://books.google.co.id/books?id=pOVuCQAAQBAJ>.
- [17] T. Editor, *Mesjid-Mesjid Bersejarah Di Jakarta* (Erlangga, 2011), <https://books.google.co.id/books?id=pOVuCQAAQBAJ>.

- [18] T. Editor, *Mesjid-Mesjid Bersejarah Di Jakarta* (Erlangga, 2011), <https://books.google.co.id/books?id=pOVuCQAAQBAJ>.
- [19] Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *PSAK No. 25 (Revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Kesalahan* (Jakarta: IAI, 2019).
- [20] Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *PSAK No. 25 (Revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Kesalahan* (Jakarta: IAI, 2019).
- [21] Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *PSAK No. 25 (Revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Kesalahan* (Jakarta: IAI, 2019).
- [22] Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *PSAK No. 25 (Revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Kesalahan* (Jakarta: IAI, 2019).M
- [23] Alqodri Pratama, "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara," n.d., Hlm. 96.
- [24] Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi ; Cetakan ketiga puluh delapan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).
- [25] Grahita Chandrarin, *Metode Riset Akuntansi: Metode Riset Kuantitatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).
- [26] Grahita Chandrarin, *Metode Riset Akuntansi: Metode Riset Kuantitatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).
- [27] Grahita Chandrarin, *Metode Riset Akuntansi: Metode Riset Kuantitatif* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).
- [28] mam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed 1 Cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- [29] Mursyidi, *Akuntansi dasar* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 121
- [30] Rizky and Padmono, "Analisis Penerapan PSAK No. 45 Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya."
- [31] Rizky and Padmono, "Analisis Penerapan PSAK No. 45 Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya."
- [32] Sinta Putri Alni, "Analisis Sistem Akuntansi Masjid Paripurna Almuttaqin Pekanbaru," *Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2021.
- [33] Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta : Salembah Empat, 2002), Hlm. 146.
- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta : Salembah Empat, 2002), Hlm. 219.